

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI
DALAM PENETAPAN BELANJA DAN PEMBIAYAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006 – 2009**

Oleh : Abdul Muis

Abstract

Excess target of Gross Regional Domestic Product Per Capita at Current Prices (Per Capita GDP ADHB) briefly describe the success of the Government of Bekasi Regency. But in real terms angka is more dominated by the role of industri in many areas but can not fully be enjoyed by the community. While the Human Development Index (HDI) is low. This is still a high rate of infant and maternal mortality. Not to mention the low level of public education as well as people's purchasing power is still low in added floods that occur every year is still a constraint so that the persistence of special handling at the post-flooding.

Keywords : Policy, Gross Regional Domestic Product, Human Development Index.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta

pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka pemerintah dipandang perlu untuk melakukan perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk

menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA yang merupakan perpaduan usulan dari masyarakat, SKPD dan *Stake Holder* lainnya yang bersaing dalam mekanisme musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan formulasi kebijakan anggaran yang akan menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran daerah sebagai penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu kepada RKPD serta KUA, yang memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, yang menitik beratkan pada kebijakan pembangunan yaitu "Peningkatan Akses Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat".

Ada 6 (enam) prinsip yang menjadi suatu landasan operasional bagi seluruh aparat pemerintah daerah, yaitu :

1. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat;

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Pengarusutamaan Gender;
4. Pengarusutamaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*);
5. Pengarusutamaan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah;
6. Pengarusutamaan Padat Karya Produktif.

Tabel 1. Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bekasi Tahun 2006 – 2007 dan Perkiraan Tahun 2008 - 2009

NO	INDIKATOR	2006 (%)	2007 ** (%)	Perkiraan 2008 (%)	Perkiraan 2009 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (trilyun rupiah)	66,24	73,07	81,27	90,91
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (trilyun rupiah)	43,74	46,41	49,29	52,39
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,99	6,12	6,20	6,28
4.	PDRB Perkapita ADH Berlaku (Juta Rp)	32,34	34,20	36,57	39,33
5.	Investasi (PMTB) (dalam Trilyun Rp)	8,60	9,50	10,10	10,15
6.	Porsi Kredit Perbankan (Trilyun Rp)	19,42	20,15	21,00	22,00

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi

*) Angka Sementara

Berdasarkan perhitungan BPS tahun 2007, PDRB Kabupaten Bekasi atas harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 46,41 trilyun, mengalami kenaikan sebesar 6,12 % bila dibanding tahun 2006 sebesar 43,74 Trilyun. Pada tahun 2008 diperkirakan PDRB sebesar Rp. 49,29 trilyun dengan pertumbuhan sebesar 6,20 % dan pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan mencapai sebesar 6,28 %, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 mencapai Rp. 34,20 juta yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2006 sebesar 32,24 juta.

Kabupaten Bekasi sebagai daerah berbasis industri, mempunyai daya tarik tersendiri bagi para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari nilai investasi (PMTB) pada tahun 2007 sebesar Rp. 9,50 trilyun meningkat 7,56 % dari tahun 2006 yang mencapai Rp.8,60 trilyun atau 13,00 % dari total PDRB berlaku, yang mengalami kenaikan kontribusinya dibandingkan tahun 2006. Data tersebut menunjukkan bahwa komponen investasi memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Termasuk iklim sosial politik yang cukup kondusif sehingga cukup menunjang iklim investasi tersebut. Tanpa mengabaikan kepentingan skala usaha kecil dan menengah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Sektor industri rupanya memberikan kontribusi paling besar

dalam kegiatan perekonomian daerah. Kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2006 mencapai 80,60 % dan pada tahun 2007 menjadi 80,59 %, disisi lain pergerakan peranan sektor selain industri mulai nampak seperti sektor perdagangan dimana kontribusi sektor ini tertinggi setelah sektor industri dengan kontribusi mencapai 8,84%.

Jumlah perusahaan besar dan sedang sekitar 840 perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 214.619 orang. Perusahaan industri yang paling banyak adalah kelompok industri yang menghasilkan barang-barang logam, mesin dan perlengkapannya sebanyak 356 perusahaan (44,96%) dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 98.165 orang (42,62%). Dampak kenaikan BBM cukup memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sektor industri khususnya yang banyak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bagian dalam proses produksinya seperti tekstil/*garment* dan industri lainnya.

Di bidang perdagangan luar negeri pada tahun 2006 nilai ekspor Kabupaten Bekasi tercatat sebesar 8,56 milyar US\$, tahun 2005 sebesar 15,02 milyar US\$ atau mengalami penurunan 40,01 juta US\$, sedangkan nilai impor tahun 2006 sebesar 74,77 juta US\$, tahun 2005 sebesar 22,21 juta US\$ atau mengalami peningkatan sebesar 52,67 juta US\$.

Perkembangan kredit perbankan, dari dana masyarakat

yang behasil dihimpun oleh perbankan diikuti dengan penyaluran kredit pada tahun 2006 yang dapat dikucurkan sebesar Rp. 19,63 trilyun yang didominasi pada sektor industri sekitar Rp. 9,62 trilyun atau 49,54 %, sementara kredit sektor usaha mikro sebesar Rp. 3,91 trilyun, kecil Rp. 2,72 trilyun srta menengah Rp. 1,79 trilyun. Total kredit UMKM mencapai Rp.8,42 trilyun, sementara hingga posisi sepeptember 2007 posisi kredit UMKM telah mencapai 9,71 trilyun. Total kredit yang dikucurkan pada posisi September 2007 mencapai Rp. 21,01 trilyun.

Pada tahun 2006 kondisi perekonomian di Kabupaten Bekasi sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan sebagai dampak naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2007, LPE meningkat menjadi 6,12 % dan 6,20 % pada tahun 2008, sebagai motor penggerak perekonomian di Kabupaten Bekasi masih tetap didominasi pada sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan LPE tersebut didorong oleh penciptaan sektor investasi yang diperkirakan mencapai sebesar Rp. 9,50 trilyun.

Untuk mengetahui gambaran laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga (ADH) konstan tahun 2000, dapat dilihat pada table 2 berikut ini.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi Tahun 2006-2007 atas Dasar Harga Konstan.

NO	INDIKATOR	REALISASI 2006 (%)	REALISASI 2007*) (%)	PERKIRAAN 2008*) (%)
1	Pertanian	2,35	2,93	2,98
2	Pertambangan dan Penggalian	7,35	6,44	6,45
3	Industri Pengolahan	5,49	5,56	5,60
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,44	9,53	9,66
5	Bangunan/Konstruksi	8,99	9,25	9,36
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,53	9,01	9,11
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,37	10,44	10,86
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,29	5,96	6,04
9	Jasa-jasa	10,62	10,74	10,95
10	LPE Kabupaten Bekasi	5,99	6,12	6,20

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi

*) Angka Sementara

Dari tabel 2 tersebut terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2007 ditargetkan sebesar 6,10 % realisasinya mencapai 6,12 %.Padatahun 2006 realisasi LPE mencapai 5,97 % sedangkan tahun 2008 ditargetkan 6,22 %.Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2007 mencapi target yang

ditetapkan, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,15 %.

Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Perkapita ADHB), menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dari setiap penduduk Kabupaten Bekasi, pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp. 30.827.219 realisasinya mencapai Rp. 34.195.750. Pada tahun 2006 realisasinya mencapai Rp. 26.909.572,54 sedangkan tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp. 33.611.244. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa capaian PDRB perkapita ADHB Kabupaten Bekasi pada tahun 2007 telah melampaui target yang ditetapkan, dibandingkan dengan realisasi tahun 2006 terdapat peningkatan sebesar Rp. 7.286.177. Secara riil tingginya nilai PDRB ADHB tersebut didominasi oleh peranan industri pengolahan dan ini tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat atau hasil dari industri pengolahan kebanyakan diekspor tercatat tahun 2006 sebesar US\$ 8,56 juta, namun *multiflier effect* dari adanya industri cukup memberikan pengaruh perkembangan perekonomian terhadap daerah sekitarnya. Sebagai pembanding untuk mendapatkan nilai PDRB perkapita Kabupaten Bekasi yang mendekati riil yaitu dengan PDRB perkapita tanpa Industri pengolahan.

Untuk mengetahui Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi tahun 2001 sampai tahun 2006 berikut penulis sajikan sebagai pembanding dalam pencapaian PDRB tahun 2007 – sampai tahun 2012 ke depan pada tabel 3 dan tabel 4 berikut ini.

Tabel. 3. Produk Domestik Bruto Kabupaten Bekasi 2000 - 2006

Th	PDRB/Kapita			Pertumbuhan PDRB
	ADHB 2000	ADHK 2000	ADH B	ADHK 2000
		30.52 8.127		30.528.1 27
2001	33.719.807	31.78 3.600	10,5 %	4,1%
2002	37.255.435	33.31 6.466	10,5 %	4,8%
2003	41.111.251	35.22 5.025	10,3 %	5,7%
2004	45.690.396	37.37 7.650	11,1 %	6,1%
2005	53.923.434	39.62 5.108	18,0 %	6,0%
2006 *	60.330.000	41.99 0.000	11,9 %	

*) Angka Proyeksi

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi, Bapeda Kabupaten Bekasi

Tabel 4. Proyeksi PDRB dan PDRB per Kapita 2007 – 2012

TH	PDRB (Juta Rp)		PDRB/ Kapita ADHB	Jumlah Penduduk ADHK 2000	
	ADHB	ADHK 2000		ADHB	ADHK 2000
2007	68.494. 505,20	44.546. 906,07	30.827. 219	20. 04 9.1 59	2.221 .884
2008	78.211. 478,18	47.317. 723,63	33.611. 242	20. 33 4.7 07	2.326 .944
2009	89.374. 211,40	50.298. 740,22	36.661. 560	20. 63 2.6 89	2.437 .818
2010	101.84 6.382,6 0	53.568. 158,33	39.863. 813	20. 96 7.1 76	2.554 .858
2011	117.36 7.975,0 0	57.532. 202,05	43.819. 576	21. 47 9.7 67	2.678 .437
2012	135.06 5.598,5 3	61.588. 222,29	48.083. 982	21. 92 5.6 94	2.808 .952

Sumber : Bapeda Kabupaten Bekasi

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis serta fokus dan isu strategis pembangunan di atas, maka strategi pokok dalam pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2007 sampai 2012 adalah :

A. Strategi Pembangunan

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas.

Yang dimaksud dengan SDM berkualitas adalah SDM yang memiliki kompetensi unggul sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah, yang

memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki moralitas berdasarkan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Dimana sasarannya ada pada aparat birokrasi maupun masyarakat. Hal ini merupakan sasaran untuk semua program sehingga baik proses perencanaan sampai pada pelaksanaan pembangunan akan dapat berjalan lancar dengan SDM yang berkualitas tersebut.

2. Penguatan Struktur Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Industri Berkelanjutan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Kabupaten Bekasi memiliki dua sumber daya ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat, yaitu sektor agribisnis dan sektor industri. Oleh karena itu penguatan struktur ekonomi berbasis agribisnis dan industri berkelanjutan dipilih menjadi salah satu strategi pokok pembangunan bukan tanpa alasan. Dengan strategi penguatan struktur ekonomi berbasis agribisnis diharapkan sektor agribisnis yang selama ini cenderung kurang optimal dapat lebih dioptimalkan sehingga masyarakat yang bekerja di sektor tersebut bias lebih sejahtera. Sedangkan penguatan struktur ekonomi berbasis industri berkelanjutan dimaksudkan

agar industri yang ada, baik industri besar maupun industri kecil dapat berkembang dengan baik dan berdampingan secara harmonis, ramah terhadap lingkungan alam dan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat
Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bekasi cukup rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan rendahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemberdayaan masyarakat dijadikan suatu strategi pokok pembangunan lima tahun ke depan. Pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi :
 - a. Aspek pendidikan;
 - b. Aspek kesehatan;
 - c. Aspek ekonomi.

Dengan demikian maka diharapkan strategi pemberdayaan masyarakat dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini terjadi.

4. Revitalisasi Kawasan dan Wilayah Menuju Ramah Lingkungan
Dari data tersebut pula menunjukkan bahwa

cukup banyak permasalahan mengenai kawasan dan kewilayahan yang menjadi penghambat pembangun Kabupaten Bekasi, antara lain sering terjadinya bencana banjir. Dimana dari 23 Kecamatan yang ada hampir separuhnya mengalami banjir tiap tahun. Sehingga banyak lahan produktif yang rusak, banyak jalan-jalan strategis yang rusak parah, termasuk sekolah-sekolah. Belum lagi pasca banjir banyak persediaan makanan, masyarakat berkurang, termasuk persediaan obat-obatan. Ini semua akan menghambat laju pembangunan di Kabupaten Bekasi. Karena berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan infra struktur pasca banjir tersebut. Belum lagi kerugian yang bersifat sosial. Dengan strategi ini diharapkan semua masalah bencana tersebut dapat teratasi.

B. Prioritas Pembangunan

Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, pembangunan diprioritaskan sesuai pada tema pembangunan tahunan. Penekanan program dan kegiatan tiap tahunnya yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

Tema ini menekankan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD memiliki program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung tercapainya peningkatan pelayanan public, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu terhadap prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabelitas harus mulai diterapkan.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

Bagaimana agar setiap SKPD memiliki program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung terhadap tercapainya pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Pemberdayaan yang dimaksud seperti :

- a. Pemberdayaan pendidikan;
- b. Pemberdayaan kesehatan;
- c. Pemberdayaan ekonomi.

3. Pemantapan Ketahanan Pangan.

Penekanan pada semua SKPD memiliki

program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung tercapainya ketahanan pangan yang kokoh di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

4. Peningkatan dan Promosi Investasi Terpadu di Bidang Industri, Infrastruktur, Agroindustri dan Pariwisata.

Tema pembangunan ini menekankan agar semua SKPD memiliki program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung pada peningkatan investasi yang signifikan, baik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Peningkatan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat.

Pada tema pembangunan ini yaitu menekankan agar semua SKPD memiliki program dan kegiatan yang sinergis dan mendukung tercapainya peningkatan keterlibatan, sebagai ciri dari masyarakat madani.

Simpulan dan Saran

Simpulan:

1. Sejak tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan PDRB perkapita Kabupaten Bekasi dapat melampaui target yang ditetapkan. Namun secara riil tingginya nilai PDRB tersebut lebih didominasi oleh peran industri pengolahan yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh setiap individu masyarakat Kabupaten Bekasi.
2. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Nampak terlihat rendah. Hal ini karena masih banyak angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
3. Masih rendahnya tingkat daya beli masyarakat.
4. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ditambah sering terjadinya bencana banjir di berbagai wilayah Kecamatan.

Saran:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
2. Melakukan peningkatan pelayanan pangan dengan berbagai program kegiatan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di setiap SKPD serta menciptakan *Good Governance* serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Daftar Pustaka :

David Hulme, 1997, *Governance, Administration and Development*, MacMillan, London.

Kaho, Josef Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supriatna, Tjahya, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Dokumen-dokumen:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Draf *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, Kabupaten Bekasi, 2007-2012.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008